



Peningkatan Literasi Keuangan dan Pemisahan Aset Pribadi dengan Aset Usaha pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur

Maria Yosefa Kabosu*, Bendiktus Gulo, Ratna Dahmayanti,
M. Zulqisthi, Holiawati, Nofryanti.

Universitas Pamulang

Alamat: Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Email : yenikabosu19@gmail.com*, niatsyukur04@gmail.com, ratnadamahyanti96@gmail.com,
m.zulqisthi@gmail.com, nofryanti@unpam.ac.id, dosen00011@unpam.ac.id

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a very significant contribution to Indonesia's economy and also help contribute to the national Gross Domestic Product (GDP). Unfortunately, financial management is still a major challenge for many MSME players today. They generally get stuck in classic problems, such as mixing personal money with business capital, neglecting daily cash recording, and struggling to get capital injections from the banking sector. This study is based on Community Service activities aimed at improving the financial literacy of MSME players in the Sepatan Timur District through education on modern financial management strategies. The implementation methods used include a participatory approach through educational counseling, interactive discussions, and direct consultations. The material covered included cash flow management, the importance of separating personal and business assets, and simple financial planning techniques. The results showed that after the educational intervention, participants gained a much more comprehensive understanding of the importance of structured financial management in efforts to boost business credibility. This understanding directly contributes to MSMEs' readiness to increase their chances of accessing funding from formal financial institutions. The program received a positive response and is estimated to help push the growth of MSMEs towards becoming more professional, sustainable, and competitive in an increasingly challenging market.*

Keywords: *Financial literacy, SMEs, financial management, cash flow, community service.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, dan turut berkontribusi dalam menyumbangkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sayangnya, tata kelola keuangan masih menjadi momok bagi banyak pelaku UMKM saat ini. Mereka umumnya terjebak dalam masalah klasik, seperti mencampur uang pribadi dengan modal usaha, mengabaikan pencatatan kas harian, serta kesulitan mendapatkan suntikan modal dari sektor perbankan. Kajian ini didasarkan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi finansial pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan Timur melalui edukasi strategi manajemen keuangan modern. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif melalui penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, dan konsultasi langsung. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan arus kas, urgensi pemisahan aset pribadi dan bisnis, serta teknik perencanaan keuangan sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah intervensi edukasi, peserta memperoleh pemahaman yang jauh lebih komprehensif mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang terstruktur dalam upaya meningkatkan kredibilitas usaha. Pemahaman ini secara langsung bermuara pada kesiapan UMKM untuk memperbesar peluang memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Program ini mendapat respons positif dan diestimasikan mampu mendorong transisi pertumbuhan UMKM menuju entitas bisnis yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: Literasi finansial, UMKM, manajemen keuangan, arus kas, pengabdian kepada masyarakat.

Received: June 17, 2026; Revised: June 23, 2026; Accepted: June 30, 2026; Published: August 31, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan di berbagai lapisan masyarakat. Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), eksistensi sektor UMKM mampu menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan secara impresif menyerap hingga 97% total angkatan kerja di Indonesia. Fakta empiris ini menegaskan bahwa keberlangsungan, perlindungan, dan pengembangan sektor UMKM harus selalu menjadi episentrum dalam perumusan kebijakan ekonomi makro nasional.

Perkembangan transformasi digital pada sektor keuangan telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan digital, pembiayaan berbasis teknologi (*financial technology*), serta program kredit pemerintah. Namun demikian, pemanfaatan layanan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan pelaku usaha. Pelaku UMKM yang memiliki kemampuan memahami produk dan layanan keuangan cenderung lebih siap dalam mengambil Keputusan pembiayaan yang tepat, mengelola risiko usaha, serta menjaga keberlanjutan bisnisnya (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

Di sisi lain, peningkatan akses pembiayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan program kredit, tetapi juga pada kesiapan internal pelaku UMKM dalam memenuhi aspek kelayakan usaha (*bankability*). Bank Indonesia menegaskan bahwa penguatan kapasitas UMKM melalui peningkatan tata kelola usaha, pencatatan keuangan, digitalisasi, dan pengembangan kompetensi kewirausahaan merupakan prasyarat penting agar pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas manajemen keuangan menjadi integral dalam mendukung peningkatan daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Namun demikian, di balik kontribusi masif tersebut, sektor UMKM di Indonesia masih terus dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural yang menghambat eskalasi bisnis mereka. Salah satu hambatan paling krusial adalah tingginya asimetri informasi dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, khususnya fasilitas kredit dari sektor perbankan. Permasalahan ini menjadi titik kritis karena kelancaran akses terhadap kredit merupakan determinan utama dalam membiayai ekspansi usaha, modernisasi kapasitas produksi, serta menjaga keberlanjutan siklus bisnis UMKM itu sendiri. Tanpa adanya sokongan pembiayaan yang memadai dan tepat waktu, entitas UMKM akan mengalami stagnasi dan kesulitan dalam melakukan penetrasi pasar di tengah dinamika persaingan yang semakin ketat.

Akar permasalahan dari rendahnya tingkat penetrasi kredit pada sektor UMKM sebagian besar bermuara pada rendahnya literasi keuangan dan inefisiensi manajemen keuangan yang dipraktikkan oleh para pelaku usaha. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memiliki literasi yang cukup terkait standar pencatatan akuntansi yang baku, seperti yang diamanatkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (PSAK EMKM). Padahal, ketersediaan laporan keuangan yang andal, transparan, dan relevan merupakan prasyarat mutlak (kovenan) yang dievaluasi oleh lembaga keuangan dalam proses credit scoring kelayakan suatu usaha (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Ketidakmampuan merangkum aktivitas ekonomi ke dalam laporan keuangan yang sistematis menghasilkan informasi yang bias, tidak dapat diperbandingkan, dan gagal memenuhi karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Implikasinya, tingkat kepercayaan perbankan (trust issue) menjadi rendah, berujung pada tingginya angka penolakan pengajuan kredit.

Sejumlah penelitian empiris juga menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan yang positif dengan kemampuan UMKM dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, dan pemanfaatan produk keuangan formal cenderung mampu memenuhi persyaratan administrasi pembiayaan dengan lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan melalui kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperkuat tata kelola keuangan UMKM sekaligus meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kohardinata, 2024; OJK, 2024).

Lebih jauh, praktik inefisiensi administrasi diperparah oleh kebiasaan pelaku UMKM yang sering kali tidak melakukan delimitasi (pemisahan) antara kas pribadi dan kas operasional usaha (Sari & Putra, 2022). Pencampuran dana ini mendistorsi realitas keuntungan usaha yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah sejatinya telah meluncurkan berbagai stimulus pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi, absorpsi program ini kerap tidak optimal lantaran ketidaksiapan manajerial UMKM dalam memenuhi rigiditas syarat administrasi perbankan. Oleh karena itu, riset dan kegiatan pengabdian ini hadir sebagai pendekatan komprehensif untuk menjembatani jurang gap tersebut, melalui intervensi edukasi tata kelola keuangan bagi UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.

2. KAJIAN TEORETIS

2.1. Konseptualisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM diakui secara luas sebagai sektor vital yang meredam guncangan ekonomi dan mendistribusikan pemerataan kesejahteraan. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh subjek perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria kuantitatif tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam siklus perkembangannya, UMKM sering terhambat oleh credit rationing akibat absennya riwayat kredit dan laporan keuangan yang memadai untuk mitigasi risiko perbankan.

2.2. Dasar Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan diartikan sebagai serangkaian proses komprehensif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, serta pengendalian sumber daya moneter guna merealisasikan tujuan organisasi secara efektif (Fahmi, 2020). Menurut Kasmir (2019), spektrum manajemen keuangan mencakup segala aktivitas fundamental yang berkaitan erat dengan perolehan dana, alokasi penggunaan, serta optimalisasi pengelolaan dana perusahaan. Bagi entitas mikro, disiplin finansial ini krusial untuk mengamankan likuiditas arus kas dan menjaga stabilitas modal kerja. Manifestasi paling dasar dari manajemen keuangan UMKM adalah disiplin pencatatan transaksi harian, segregasi (pemisahan) dana privat dan bisnis, serta periodisasi penyusunan laporan keuangan :

2.3. Aksesibilitas Kredit dan Pembiayaan Eksternal

Akses kredit mencerminkan kapabilitas entitas bisnis untuk menyerap dana segar dari intermediari keuangan (Bank Indonesia, 2023). Fasilitas ini berperan ganda sebagai leverage perluasan pangsa pasar dan pengaman cadangan modal kerja operasional. Analisis kelayakan kredit oleh perbankan konvensional umumnya bertumpu pada analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Oleh sebab itu, akuntabilitas penyajian informasi keuangan oleh UMKM menjadi variabel kunci yang menjembatani asimetri informasi antara debitur dan kreditur.

2.4. Urgensi Literasi Keuangan

Literasi keuangan mengindikasikan tingkat kognisi seseorang dalam mencerna dan mengaplikasikan instrumen keuangan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis. Otoritas Jasa Keuangan (2024) mendefinisikan literasi keuangan sebagai akumulasi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan sikap yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan keuangan yang terukur. Injeksi literasi melalui sosialisasi dan pendampingan ekstensif terbukti mampu mengubah paradigma UMKM dari orientasi kasir (cashier orientation) menjadi orientasi perencana bisnis (business planner orientation).

3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan aksi komunitas (community action) dengan metode penyuluhan edukatif, diskusi partisipatif, serta pendampingan aplikatif kepada para pelaku UMKM. Pemilihan metode ini dilandasi oleh kebutuhan untuk tidak sekadar mentransfer knowledge, tetapi juga memastikan retensi keterampilan peserta dalam mempraktikkan literasi keuangan dasar dan strategi menembus pembiayaan formal.

- Lokasi dan waktu pelaksanaan: Kegiatan diimplementasikan secara terpusat di Kecamatan Sepatan Timur pada hari Minggu, 10 Mei 2026, yang menjangkau pelaku UMKM lokal dari berbagai sektor riil.
- Tahap Identifikasi: Dimulai dengan observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur guna menetapkan baseline kompetensi literasi keuangan serta mengkurasi kendala riil administrasi pengajuan kredit peserta.
- Tahap Intervensi (Penyuluhan & Edukasi): Tim fasilitator memaparkan modul terstruktur terkait: (1) Filosofi literasi keuangan; (2) Pemisahan aset; (3) Manajemen cash flow; (4) Pencatatan transaksi berbasis.
- Pendampingan Sederhana & Simulasi: Peserta didampingi dalam simulasi bedah kasus (case study), mempraktikkan pencatatan transaksi harian, mengelompokkan pos aset, hingga menyusun neraca dan laba-rugi sederhana yang disesuaikan dengan skala mikro.
- Tahap Evaluasi: Penilaian komparatif dilakukan pasca-kegiatan menggunakan diskusi dan umpan balik observasi partisipatif untuk mengukur tingkat asimilasi materi oleh peserta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemetaan Kompetensi dan Kendala Eksisting UMKM Sepatan Timur

Evaluasi awal (baseline study) pada saat kegiatan memvalidasi hipotesis bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan Timur memiliki pemahaman tata kelola bisnis yang sangat tradisional; di mana kesuksesan hanya diukur dari adanya surplus kas harian tanpa perhitungan akuntansi yang presisi. Absennya rutinitas pencatatan dan pelaporan keuangan sederhana mendominasi profil peserta. Fenomena ini selaras dengan postulat Putri dan Rahman (2023) yang mengonfirmasi bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan kausa prima yang memicu stagnansi ekspansi UMKM di negara berkembang. UMKM mereduksi konsep manajemen sebatas kalkulasi pemasukan dikurangi pengeluaran.

Kelemahan struktural ini terefleksi dalam beberapa temuan kendala utama:

- Ambiguitas Entitas (Pencampuran Dana): Mayoritas responden gagal

mengimplementasikan prinsip business entity (kesatuan usaha). Rekening rumah tangga dan bisnis berada dalam satu pool of fund. Hal ini mengaburkan indikator profitabilitas (Sari & Nugroho, 2022).

- Anomali Pencatatan: Dokumentasi transaksi yang sporadis dan tidak historis berakibat pada ilusi laba (laba semu) dan informasi yang tak tervalidasi.
- Literasi Produk Perbankan Marginal: Ekosistem UMKM masih mengandalkan pendanaan berbiaya tinggi (predatory lending) akibat bias pemahaman terhadap produk perbankan formal, syarat kelayakan, maupun skema penjaminan kredit.
- Keterbatasan Bandwidth Manajerial: Fokus yang overload pada teknis operasional (produksi/penjualan) meminggirkan fungsi administratif.

4.2. Strategi Restrukturisasi Tata Kelola Menuju Aksesibilitas Kredit

Melalui metode simulasi interaktif, tim pengabdian menginternalisasikan strategi-strategi aplikatif agar UMKM lebih bankable.

Strategi tersebut mencakup :

- Disiplin Pemisahan Aset: Pemisahan wallet pribadi dan bisnis adalah langkah fundamental memulihkan objektivitas neraca keuangan, sehingga lembaga pemberi kredit dapat menilai Capacity to Repay murni dari arus kas bisnis.
- Pencatatan Kronologis dan Laporan Sederhana: Membiasakan pembukuan harian (general ledger mini) akan bertransformasi menjadi laporan laba rugi dan posisi keuangan. Instrumen ini merupakan amunisi utama dalam negosiasi proposal pembiayaan kepada analis kredit.
- Manajemen Reputasi Kredit: Menjaga rasio lancar kas dan historis repayment yang positif menjadi sinyal kredibilitas (reputasi) di mata institusi perbankan.

Implementasi strategi-strategi di atas secara empiris didukung oleh riset Hidayat dan Prasetyo (2024), yang merumuskan bahwa kualitas tata kelola administrasi berbanding lurus secara signifikan terhadap probabilitas diterimanya pengajuan fasilitas kredit formal.

4.3. Optimalisasi Peluang Pembiayaan melalui Edukasi Berkelanjutan

Tindak lanjut edukasi selama PKM ini membuahkan pergeseran kognitif yang positif. Pelaku UMKM mulai memandang bahwa proses administrasi bukan sekadar beban birokrasi, melainkan instrumen leverage strategis penambah nilai (value creation) di hadapan eksternal stakeholder (perbankan). Peserta memvalidasi pemahaman baru bahwa transparansi akuntabilitas (seperti pemisahan aset) adalah investasi jangka panjang untuk skalabilitas usaha. Temuan ini beresonansi erat dengan kesimpulan Wibowo et al. (2025), di mana peningkatan literasi finansial

terbukti mempercepat kesiapan dan resiliensi UMKM dalam bernegosiasi dengan lembaga intermediasi keuangan formal. Kapasitas finansial yang mumpuni dapat mengonversi UMKM dari status unbankable menjadi bankable.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan, edukasi yang diberikan selama kegiatan PKM juga mendorong perubahan perilaku keuangan (*financial behavior*) pelaku UMKM. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran peserta untuk melakukan pencatatan transaksi secara konsisten, menyusun laporan keuangan sederhana, serta memisahkan aset pribadi dari aset usaha sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas. Perubahan perilaku ini merupakan indikator penting dalam membangun kredibilitas usaha karena lembaga keuangan tidak hanya menilai kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga konsistensi pengelolaan keuangan dan kemampuan usaha menghasilkan arus kas yang sehat. Dengan demikian, edukasi keuangan berkelanjutan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata Kelola UMKM sehingga mampu memenuhi aspek *bankability* yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses analisis kredit oleh lembaga keuangan formal (Bank Indonesia, 2024; Antoni & Karlin, 2024).

Lebih lanjut, keberhasilan optimalisasi peluang pembiayaan memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemeritnah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Pendampingan yang dilakukan secara periodik memungkinkan pelaku usaha memperoleh pembaruan informasi mengenai produk pembiayaan, digitalisasi layanan keuangan, serta penguatan kapasitas manajerial yang relevan dengan perkembangan lingkungan bisnis. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus dilakukan secara berkesinambungan melalui kolaborasi multipihak agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan PKM tidak hanya dipandang sebagai program penyuluhan sesaat, melainkan sebagai investasi sosial yang memperkuat kapasitas kelembagaan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing usaha secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis mendalam terhadap pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Sepatan Timur, dapat disimpulkan bahwa titik awal (*starting point*) literasi keuangan pelaku UMKM masih berada pada kuadran yang marginal. Praktik inefisiensi seperti pencampuran entitas dana pribadi dengan usaha, serta vakumnya sistem pencatatan kronologis yang terstandarisasi, masih sangat dominan. Rentetan kendala ini mendegradasi kualitas informasi finansial, yang pada gilirannya menciptakan hambatan sistemik bagi UMKM untuk melakukan penetrasi pada program

pembiayaan formal (kredit perbankan). Intervensi akademis melalui PKM ini sukses membekali peserta dengan kerangka kerja (framework) tata kelola usaha yang modern; mulai dari urgensi pembukuan, arsitektur laporan keuangan skala mikro, hingga rekayasa strategi pengajuan modal. Peningkatan literasi ini diyakini akan memperkuat integritas bisnis UMKM secara holistik demi mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas pengambilan Keputusan strategi pelaku UMKM. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang andal, mengelola arus kas secara efektif, serta menerapkan pemisahan aset pribadi dan aset usaha akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut menjadi dasar penting bagi lembaga keuangan dalam melakukan penilaian kelayakan usaha (*creditworthiness*) sekaligus meningkatkan kepercayaan investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, keberlanjutan program edukasi dan pendampingan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga keuangan agar tercipta ekosistem UMKM yang memiliki tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*), berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan [OJK]; Bank Indonesia, 2024).

5.2. Saran

Untuk Pelaku UMKM: Diwajibkan untuk merealisasikan pemisahan fisik maupun administratif antara aset konsumtif pribadi dengan kas produktif bisnis, serta mendisiplinkan rutinitas pencatatan guna menciptakan basis data (database) historis untuk kelayakan kredit.

Untuk Ekosistem Kebijakan (Pemerintah, Kampus, Perbankan): Diperlukan sinergi triple-helix untuk merancang program inkubasi yang tidak bersifat insidental. Edukasi harus bertransformasi menjadi pendampingan end-to-end hingga pelaku usaha mampu menyusun financial statement riil berbasis pedoman PSAK EMKM secara otodidak.

Untuk Riset Lanjutan: Arah pengabdian seyogianya mulai bergeser pada digitalisasi akuntansi, dengan memperkenalkan perangkat lunak atau aplikasi pembukuan berbasis gawai (Aplikasi Keuangan Digital UMKM) demi melipatgandakan efektivitas, presisi data, dan integrasi pengajuan kredit perbankan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Antoni, A., & Karlin, K. (2024). *Pengaruh Inovasi Produk, Literasi Keuangan, dan Akses Pembiayaan terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan

West Science, 3(3).

- Bank Indonesia. (2023). *Pengembangan UMKM dan Akses Pembiayaan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fahmi, I. (2020). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A., & Prasetyo, B. (2024). Financial Literacy and MSME Credit Accessibility in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(2), 115–130.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (PSAK EMKM)*. Jakarta: IAI
- Kasmir. (2019). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kohardinata, C. (2024). *Apakah Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, atau Dana Pihak Ketiga Perbankan Dapat Mendukung Kredit UMKM Perbankan?*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 1369-1374.
- Munawir, S. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Putri, D., & Rahman, M. (2023). Financial Management Practices and SME Sustainability. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Wibowo, A., Sari, N., & Kurniawan, D. (2025). Financial Literacy and Access to Formal Financing among Indonesian MSMEs. *Journal of Accounting and Business Research*, 8(1), 23–37.